

Selasa, 20 Januari 2026

FM-CC-AAJI-006-0

Judul POJK 36/2025 Resmi Diluncurkan, Begini Respons Bos Prudential Indonesia!

Nama Media mediaasuransinews.co.id

Newstrend

Halaman/URL <https://mediaasuransinews.co.id/asuransi/pojk-36-2025-resmi-diluncurkan-begini-respons-bos-prudential-indonesia/>

Tanggal Berita 2026-01-19 09:45

Sentiment Positive



PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) menegaskan terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan sejalan dengan komitmen dalam menerapkan tata kelola yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).

“Kami sangat mengapresiasi keputusan OJK yang telah menerbitkan POJK terkait Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan,” ujar Chief Health Officer Prudential Indonesia Yosie William Iroth, kepada Media Asuransi, dikutip Senin, 19 Januari 2026.

Judul	Prudential Indonesia Pede POJK 36/2025 Buat Industri Asuransi RI Kian Cerah
Nama Media	mediaasuransinews.co.id
Newstrend	
Halaman/URL	https://mediaasuransinews.co.id/asuransi/prudential-indonesia-pede-pojk-36-2025-buat-industri-asuransi-ri-kian-cerah/
Tanggal Berita	2026-01-19 12:02
Sentiment	Positive



Media Asuransi, JAKARTA – PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) berharap lahirnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan dapat mendukung pelaku industri dalam menghadirkan inovasi perlindungan jiwa dan kesehatan finansial. Chief Health Officer Prudential Indonesia Yosie William Iroth mengungkapkan Prudential Indonesia tentu ingin melihat industri perasuransian dapat terus tumbuh dan berkembang di masa mendatang, sehingga dapat terus memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Indonesia. “Kita (Prudential) ingin melihat industri asuransi terus tumbuh dan berkembang. Sehingga dapat terus memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Indonesia secara berkelanjutan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan tentu saja visi Indonesia Emas 2045 yang dicanangkan pemerintah,” tutur Yosie, kepada Media Asuransi, dikutip Senin, 19 Januari 2026. Selain itu, Yosie menilai, POJK 36/2025 sejalan dengan peta jalan Perasuransian Indonesia 2023-2027 yakni untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan industri asuransi dan akan memperkuat fondasi industri asuransi di Indonesia.

Judul	AXA Mandiri Kelola Rp16 Triliun Dana Pensiun
Nama Media	Haluan Padang
Newstrend	
Halaman/URL	Pg3
Tanggal Berita	2026-01-19 12:07
Sentiment	Positive

AXA Mandiri Kelola Rp16 Triliun Dana Pensiun

JAKARTA, HALUAN— Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) membeberkan sejumlah tantangan dalam meningkatkan jumlah kepesertaan dari sektor informal pada tahun 2026.

Direktur PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) Uke Giri Utama mengatakan, tantangannya berasal dari rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan, khususnya pada produk pensiun.

"Selain itu, karakteristik pendapatan yang tidak stabil, serta belum optimalnya pemanfaatan ekosistem digital juga menjadi tantangan," katanya, Jumat (16/1).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Uke menilai diperlukan pendekatan terpadu melalui peningkatan literasi keuangan berbasis edukasi sederhana dan berkelanjutan, pengembangan produk pensiun individu dengan iuran fleksibel yang sesuai karakteristik pendapatan pekerja informal, serta penguatan kepercayaan publik melalui transparansi kinerja dan proses yang lebih mudah dipahami.

Uke berpendapat, upaya itu perlu didukung oleh optimalisasi pemanfaatan ekosistem digital agar akses dan pembayaran iuran lebih mudah, melakukan penyederhanaan proses administrative, dan registrasi digital.

"Dengan demikian, hambatan pendaftaran dapat diminimalkan dan perluasan kepesertaan dapat berlangsung lebih efektif," tutur dia.

Hingga Desember 2025, Uke menyampaikan jumlah peserta DPLK AXA Mandiri mencapai 554 lebih dari perusahaan, dengan total pekerja yang terdaftar mencapai 237.137. Lebih lanjut, dia bilang DPLK AXA Mandiri telah mengelola lebih dari Rp16 triliun dana pensiun peserta.

"Kami akan terus berinovasi dan memperkuat komitmen untuk memberikan perlindungan finansial jangka panjang bagi seluruh peserta," ucap Uke. (h/km)

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) membeberkan sejumlah tantangan dalam meningkatkan jumlah kepesertaan dari sektor informal pada tahun 2026.

Direktur PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) Uke Giri Utama mengatakan, tantangannya berasal dari rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan, khususnya pada produk pensiun.

Judul	SPKR Desak BPK Lakukan Audit Investigatif Jampidsus Terkait Aset Perkara Jiwasraya
Nama Media	jakartasatu.com
Newstrend	
Halaman/URL	https://jakartasatu.com/2026/01/19/spkr-desak-bpk-lakukan-audit-investigatif-jampidsus-terkait-aset-perkara-jiwasraya/
Tanggal Berita	2026-01-19 12:46
Sentiment	Negative



SPKR Desak BPK Lakukan Audit Investigatif Jampidsus Terkait Aset Perkara Jiwasraya JAKARTASATU.COM — Serikat Pemuda Kerakyatan (SPKR) mendesak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) untuk segera melakukan audit investigatif terhadap pengelolaan barang bukti dalam perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Desakan tersebut disampaikan Amri, koordinator SPKR, menyusul rendahnya nilai pemulihan kerugian negara dari kasus Jiwasraya yang hingga kini baru mencapai sekitar Rp5 triliun dari total kerugian negara sebesar Rp16 triliun. “Artinya, pemulihan kerugian negara baru sekitar 30 persen. Ini angka yang sangat tidak wajar dan patut diduga ada masalah serius dalam pengelolaan aset barang bukti,” kata Amri kepada wartawan, Senin (19/1/2026). Menurut Amri, kondisi tersebut mengindikasikan adanya potensi penyimpangan, termasuk dugaan korupsi baru dalam proses pengelolaan, penilaian, dan pelepasan aset hasil sitaan negara. Ia menilai, tanpa audit investigatif yang menyeluruh, negara berisiko kembali dirugikan.

Judul	SPKR Desak BPK Audit Investigatif Jampidsus Terkait Aset Perkara Jiwasraya
Nama Media	sriwijayamedia.com
Newstrend	
Halaman/URL	https://sriwijayamedia.com/2026/01/spkr-desak-bpk-audit-investigatif-jampidsus-terkait-aset-perkara-jiwasraya/
Tanggal Berita	2026-01-19 13:04
Sentiment	Negative



Sriwijayamedia.com- Serikat Pemuda Kerakyatan (SPKR) mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk segera melakukan audit investigatif terhadap pengelolaan barang bukti dalam perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Desakan tersebut disampaikan Amri, Koordinator SPKR, menyusul rendahnya nilai pemulihan kerugian negara dari kasus Jiwasraya yang hingga kini baru mencapai sekitar Rp5 triliun dari total kerugian negara sebesar Rp16 triliun. “Artinya, pemulihan kerugian negara baru sekitar 30 persen. Ini angka yang sangat tidak wajar dan patut diduga ada masalah serius dalam pengelolaan aset barang bukti,” kata Amri, kepada wartawan, Senin (19/1/2026). Menurut Amri, kondisi tersebut mengindikasikan adanya potensi penyimpangan, termasuk dugaan korupsi baru dalam proses pengelolaan, penilaian, dan pelepasan aset hasil sitaan negara.

Judul	Lewat 5 Hal Ini, IFG Dorong Resolusi Keuangan Sehat untuk Hadapi Ketidakpastian Ekonomi 2026
Nama Media	investortrust.id
Newstrend	
Halaman/URL	https://investortrust.id/financialtrust/91709/lewat-5-hal-ini-ifg-dorong-resolusi-keuangan-sehat-untuk-hadapi-ketidakpastian-ekonomi-2026
Tanggal Berita	2026-01-19 14:56
Sentiment	Positive



JAKARTA, investortrust.id - Memasuki tahun 2026, resolusi keuangan kembali menjadi perhatian di tengah ketidakpastian ekonomi global yang terus membayangi. Sejalan dengan itu, PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) menekankan pentingnya kesiapan finansial sejak dini melalui kebiasaan keuangan yang sehat dan terukur.

Corporate Secretary IFG Life Gatot Haryadi menekankan pentingnya kesiapan finansial sejak dini melalui kebiasaan keuangan yang sehat dan terukur. Ketika kondisi ekonomi semakin menantang, literasi keuangan menjadi semakin penting.

Judul Perkuat Perlindungan Finansial, Allianz Life Hadirkan Income Assurance untuk Nasabah QNB

Nama Media infoekonomi.id

Newstrend

Halaman/URL <https://infoekonomi.id/2026/01/perkuat-perlindungan-finansial-allianz-life-hadirkan-income-assurance-untuk-nasabah-qnb/>

Tanggal Berita 2026-01-19 15:37

Sentiment Positive



Allianz Life Indonesia bersama Bank QNB Indonesia resmi meluncurkan Allianz Life Income Assurance, solusi perlindungan jiwa dengan manfaat tunai terjamin yang ditujukan bagi nasabah Bank QNB Indonesia. Produk ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan proteksi finansial sekaligus kepastian arus pendapatan di tengah kondisi ekonomi yang dinamis.

Country Chief Bancassurance Officer Allianz Life Indonesia, Ancilla Lily, mengatakan bahwa tantangan ekonomi saat ini menjadi dorongan bagi Allianz untuk terus memastikan keamanan finansial nasabah dan mitra tetap terjaga

Judul	KPK Didesak Lakukan Audit Investigatif Aset Jiwasraya
Nama Media	rri.co.id
Newstrend	
Halaman/URL	https://rri.co.id/hukum/2115478/kpk-didesak-lakukan-audit-investigatif-aset-jiwasraya
Tanggal Berita	2026-01-19 16:00
Sentiment	Negative



RRI.CO.ID, JAKARTA- Serikat Pemuda Kerakyatan (SPKR) mendesak KPK dan BPK melakukan audit investigatif. Khususnya, terhadap pengelolaan barang bukti dalam perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Koordinator SPKR Amri mengatakan, pemulihan kerugian negara dalam kasus Jiwasraya masih jauh dari optimal. Hingga saat ini, nilai aset yang berhasil dipulihkan baru sekitar Rp5 triliun dari total kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp16 triliun.

"Artinya, pemulihan kerugian negara baru sekitar 30 persen. Ini angka yang sangat tidak wajar dan patut diduga terdapat persoalan serius dalam pengelolaan aset barang bukti," kata Amri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 19 Januari 2026.

Judul	Kolaborasi Allianz Life dan Bank QNB Indonesia Hadirkan Allianz Life Income Assurance
Nama Media	olenka.id
Newstrend	
Halaman/URL	https://olenka.id/kolaborasi-allianz-life-dan-bank-qnb-indonesia-hadirkan-allianz-life-income-assurance/all
Tanggal Berita	2026-01-19 16:20
Sentiment	Positive



PT Asuransi Allianz Life Indonesia (Allianz Life) bersama dengan PT Bank QNB Indonesia Tbk (Bank QNB Indonesia) menghadirkan Allianz Life Income Assurance sebagai sebuah solusi perlindungan jiwa dengan manfaat tunai terjamin yang dirancang khusus untuk nasabah Bank QNB Indonesia. Produk ini menghadirkan kombinasi antara perlindungan jiwa dan kepastian arus pendapatan yang akan didapatkan secara berkala.

Allianz Life Income Assurance dirancang sebagai produk asuransi tradisional dwiguna kombinasi untuk solusi perlindungan dan rencana keuangan masa depan dijamin dengan menyediakan proteksi jiwa maksimum dengan jaminan manfaat tunai tahunan. Proses underwriting untuk identifikasi risiko calon tertanggung yang mudah melalui Guaranteed Issue Offer (penawaran jaminan diterima) memungkinkan nasabah memberikan pernyataan kesehatan pada Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) tanpa perlu pemeriksaan medis, dengan maksimal Uang Pertanggungan hingga Rp3 miliar.

Judul	KPK dan BPK Didesak Audit Investigatif terkait Aset Perkara Jiwasraya
Nama Media	rmol.id
Newstrend	
Halaman/URL	https://rmol.id/nusantara/read/2026/01/19/694326/kpk-dan-bpk-didesak-audit-investigatif-terkait-aset-perkara-jiwasraya
Tanggal Berita	2026-01-19 16:40
Sentiment	Negative



Serikat Pemuda Kerakyatan (SPKR) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera melakukan audit investigatif terhadap pengelolaan barang bukti dalam perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Desakan itu disampaikan ratusan orang dari SPKR saat menggelar unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, dan di depan Kantor BPK, Senin 19 Januari 2026. Koordinator SPKR, Amri mengatakan, desakan ini disuarakan menyusul rendahnya nilai pemulihan kerugian negara dari kasus Jiwasraya yang hingga kini baru mencapai sekitar Rp5 triliun dari total kerugian negara sebesar Rp16 triliun. "Artinya, pemulihan kerugian negara baru sekitar 30 persen. Ini angka yang sangat tidak wajar dan patut diduga ada masalah serius dalam pengelolaan aset barang bukti," kata Amri saat berorasi di atas mobil komando, Senin, 19 Januari 2026.

Judul Kejagung Banding Vonis Ringan Eks Pejabat Kemenkeu di Kasus Jiwasraya
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend
Halaman/URL <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260119170712-12-1318598/kejagung-banding-vonis-ringan-eks-pejabat-kemenkeu-di-kasus-jiwasraya>
Tanggal Berita 2026-01-19 17:24
Sentiment Negative



Kejaksaan Agung (Kejagung) mengajukan banding terkait vonis ringan 1,5 tahun penjara terhadap Dirjen Kemenkeu Isa Rachmatarwata di kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya periode 2008-2018.

Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Riono Budisantoso mengatakan pengajuan banding lantaran Majelis Hakim dinilai tidak mengakomodir tuntutan pembedanaan dan penerapan pasal.

Judul	KPK dan BPK Didesak Segera Audit Aset Sitaan Kasus PT Jiwasraya
Nama Media	kabarbaru.co
Newstrend	
Halaman/URL	https://kabarbaru.co/kpk-dan-bpk-didesak-segera-audit-aset-sitaan-kasus-pt-jiwasraya/
Tanggal Berita	2026-01-19 18:07
Sentiment	Negative



Ratusan massa yang tergabung dalam Serikat Pemuda Kerakyatan (SPKR) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK dan Kantor BPK, Senin (19/1/2026). Mereka mendesak kedua lembaga tersebut segera melakukan audit investigatif terhadap pengelolaan barang bukti kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Koordinator SPKR, Amri, menyoroti rendahnya angka pemulihan kerugian negara dalam perkara tersebut. Hingga saat ini, negara baru berhasil mengamankan sekitar Rp5 triliun dari total kerugian yang mencapai Rp16 triliun. Amri menilai pemulihan yang baru menyentuh angka 30 persen ini sangat tidak wajar. "Angka ini menunjukkan ada masalah serius dalam pengelolaan aset barang bukti. Kami menduga ada potensi penyimpangan atau bahkan korupsi baru dalam proses penilaian dan pelepasan aset sitaan tersebut," tegas Amri saat berorasi di atas mobil komando. Menurut Amri, barang bukti merupakan instrumen utama untuk memulihkan keuangan negara. Ia khawatir negara akan kembali merugi jika nilai aset sitaan terus menyusut secara drastis tanpa penjelasan yang transparan.

Judul Kejagung Ajukan Banding Usai Eks Dirjen Anggaran Kemenkeu Hanya Divonis 1,5 Tahun di Kasus Jiwasraya

Nama Media tribunnews.com

Newstrend

Halaman/URL <https://www.tribunnews.com/nasional/7780389/kejagung-ajukan-banding-usai-eks-dirjen-anggaran-kemenkeu-hanya-divonis-15-tahun-di-kasus-jiwasraya>

Tanggal Berita 2026-01-19 18:10

Sentiment Negative



Pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) mengajukan banding atas vonis 1,5 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap eks Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata di kasus korupsi Jiwasraya .

Direktur Penuntutan pada Jampidsus Kejaksaan Agung, Riono Budisantoso mengatakan, setidaknya terdapat dua alasan yang membuat Jaksa memutuskan mengajukan banding atas putusan hakim tersebut.

Pertama kata Riono, keputusan banding itu lantaran masa pembedaan yang dijatuhkan hakim terhadap Isa jauh lebih ringan dibanding tuntutan yang sebelumnya dijatuhkan Jaksa yakni 4 tahun penjara.

Tak hanya itu, penerapan pasal dalam putusan hakim terhadap Isa juga menjadi faktor pihaknya mengajukan banding.

Judul	Kejagung Banding Vonis Ringan Eks Pejabat Kemenkeu di Kasus Jiwasraya
Nama Media	idcorner.co.id
Newstrend	
Halaman/URL	https://idcorner.co.id/index.php/2026/01/19/kejagung-banding-vonis-ringan-eks-pejabat-kemenkeu-di-kasus-jiwasraya/
Tanggal Berita	2026-01-19 18:12
Sentiment	Negative



Jakarta, CNN Indonesia — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengajukan banding terkait vonis ringan 1,5 tahun penjara terhadap Dirjen Kemenkeu Isa Rachmatarwata di kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya periode 2008-2018.

Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Riono Budisantoso mengatakan pengajuan banding lantaran Majelis Hakim dinilai tidak mengakomodir tuntutan pembedaan dan penerapan pasal.

Judul	KPK dan BPK Didesak Lakukan Audit Jampidsus terkait Aset Perkara Jiwasraya
Nama Media	voi.id
Newstrend	
Halaman/URL	https://voi.id/berita/552198/kpk-dan-bpk-didesak-lakukan-audit-jampidsus-terkait-aset-perkara-jiwasraya
Tanggal Berita	2026-01-19 18:41
Sentiment	Negative



JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) didesak untuk mengaudit pengelolaan barang bukti dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Desakan ini disampaikan Serikat Pemuda Kerakyatan (SPKR) yang menggelar aksi di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan dan kantor BPK, Senin, 19 Januari. Pemulihan kerugian negara di kasus korupsi Jiwasraya yang hanya Rp5 triliun dari total Rp16 triliun dianggap masih rendah.

Judul KPK and BPK Urged to Audit Jampidsus a Assets of Jiwasraya Case

Nama Media voi.id

Newstrend

Halaman/URL <https://voi.id/en/news/552198>

Tanggal Berita 2026-01-19 18:41

Sentiment Negative



JAKARTA - The Corruption Eradication Commission (KPK) and the Financial Supervisory Board (BPK) are urged to audit the management of evidence of alleged corruption at PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

This demand was conveyed by the Kerakyatan Youth Association (SPKR) which held an action at the KPK Red and White building, Kuningan Persada, South Jakarta and the BPK office, Monday, January 19. The recovery of state losses in the Jiwasraya corruption case which was only Rp5 trillion out of a total of Rp16 trillion was considered still low.

"This means that the recovery of state losses is only around 30 percent. This is an extremely unnatural figure and it is suspected that there are serious problems in the management of evidence assets," said Amri as the Coordinator of the SPKR while giving a speech.

Judul	Pemulihan Aset Dinilai Janggal, KPK dan BPK Diminta Lakukan Audit Investigatif Perkara Jiwasraya
Nama Media	tribunnews.com
Newstrend	
Halaman/URL	https://www.tribunnews.com/nasional/7780423/pemulihan-aset-dinilai-janggal-kpk-dan-bpk-diminta-lakukan-audit-investigatif-perkara-jiwasraya
Tanggal Berita	2026-01-19 19:28
Sentiment	Negative



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta untuk segera turun tangan melakukan audit investigatif terhadap pengelolaan barang bukti dalam perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Desakan ini muncul menyusul dugaan ketidakwajaran dalam nilai pemulihan kerugian negara yang dinilai masih jauh dari target.

Desakan tersebut disuarakan oleh Serikat Pemuda Kerakyatan (SPKR).

Koordinator SPKR, Amri, menyoroti ketimpangan yang signifikan antara total kerugian negara dengan aset yang berhasil dipulihkan.

Berdasarkan data yang dihimpun, dari total kerugian negara yang mencapai Rp16 triliun, nilai pemulihan aset hingga kini baru menyentuh angka sekitar Rp5 triliun.

Judul	SPKR Desak KPK-BPK Investigasi Pemulihan Barbuk Kasus Jiwasraya
Nama Media	tirto.id
Newstrend	
Halaman/URL	https://tirto.id/spkr-desak-kpk-bpk-investigasi-pemulihan-barbuk-kasus-jiwasraya-hpvs
Tanggal Berita	2026-01-19 21:45
Sentiment	Negative



tirto.id - Serikat Pemuda Kerakyatan (SPKR) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menginvestigasi pengelolaan barang bukti dalam perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

ADVERTISEMENT Desakan ini, hadir atas adanya dugaan ketidakwajaran dalam pemulihan kerugian negara dalam perkara ini. Kasus ini, telah mengakibatkan kerugian negara hingga Rp16 triliun. Namun, pemulihannya diduga baru menyentuh angka Rp5 triliun.

"Artinya, pemulihan kerugian negara baru sekitar 30 persen. Ini angka yang sangat tidak wajar dan patut diduga ada masalah serius dalam pengelolaan aset barang bukti," kata Koordinator SPKR, Amri, dalam keterangannya, Senin (19/1/2026).

Judul	OJK Soroti Maraknya Fraud Pencairan Klaim Asuransi Jiwa, Pelakunya Terorganisir
Nama Media	indonesiawatch.id
Newstrend	
Halaman/URL	https://indonesiawatch.id/ojk-soroti-maraknya-fraud-pencairan-klaim-asuransi-jiwa-pelakunya-terorganisir/
Tanggal Berita	2026-01-20 05:45
Sentiment	Neutral



Jakarta, Indonesiawatch.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti maraknya kasus penipuan (fraud) dalam pencairan klaim asuransi jiwa. Kasusnya terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Bahkan, sejumlah kasus diduga dilakukan secara terorganisir. "Kami mendapatkan informasi maraknya kasus indikasi fraud ini diduga juga dilakukan oleh pihak yang mengorganisir. Hal ini ditengarai oleh dokumen pengajuan klaim yang hampir seragam dengan kasus klaim yang hampir serupa dan dilakukan di daerah tertentu," ujar Kepala Departemen Pengawasan Asuransi dan Jasa Penunjang OJK, Sumarjono kepada Indonesiawatch.id (19/01). OJK menilai fenomena ini sebagai persoalan serius karena tidak hanya merugikan perusahaan asuransi, tetapi juga mengancam kepercayaan publik dan stabilitas industri asuransi jiwa secara keseluruhan.

Judul	SPKR Desak KPK Proses Laporan Dugaan Korupsi Jampidsus
Nama Media	Harian Dis'way Malang Post
Newstrend	
Halaman/URL	Pg18
Tanggal Berita	2026-01-20 08:08
Sentiment	Negative

SPKR Desak KPK Proses Laporan Dugaan Korupsi Jampidsus

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak serius mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah. Pelanggaran yang dimaksud terkait pengelolaan barang bukti dalam perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

"SPKR mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menyelidiki peran Febrie Adriansyah selaku eks Direktur Penyidikan Jampidsus, yang saat ini menjabat sebagai Jampidsus dalam penerbitan surat pencabutan blokir saham yang berakibat raibnya aset sitaan senilai sekitar Rp 377,7 miliar," kata koordinator Serikat Pemuda Kerakyatan (SPKR) Amri kepada wartawan, Senin (19/1/2026).

Dugaan keterlibatan Febrie, sambung Amri, didasari terbitnya Surat Nomor R-769/F.2/Fd.2/05/2020 yang ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Jampidsus. Dokumen itu diklaim turut meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mencabut blokir dan mengembalikan 472.166.000 lembar saham BJBR dari KSEI ke rekening PT Jiwasraya.

"Padahal, pada saat surat itu diterbitkan, perkara Jiwasraya telah berstatus P21. Bahkan kemudian, saham yang dimaksud secara tegas dinyatakan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2931/K/Pid.Sus/2021 sebagai barang bukti yang dirampas untuk negara," tegasnya.

"Kondisi tersebut menimbulkan dugaan bahwa terdapat keputusan administratif yang tidak selaras dengan proses hukum pidana yang sedang berjalan," sambung Amri sambil menyebut akan melakukan aksi yang lebih besar jika tidak ditindaklanjuti.

Desakan itu juga pernah disampaikan oleh Gerakan Masyarakat Antikorupsi (Gema Aksi) yang mendatangi gedung Merah Putih KPK,

dan OJK, pada Kamis (15/1/2026) lalu. Mereka minta Febrie diperiksa dugaan penghilangan barang bukti kasus korupsi Jiwasraya yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.

"Ada tiga pokok dugaan utama, yakni dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penanganan perkara korupsi strategis; dugaan konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan hukum; dugaan pengondisian penegakan hukum yang berpotensi melindungi pihak tertentu," kata Koordinator Gema Aksi, Borut saat itu.

Selain ke KPK, Gema Aksi juga melakukan aksi serupa ke kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebab, Febrie saat masih menjabat sebagai Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung diduga membuat surat ke lembaga itu seolah barang sitaan dalam kasus korupsi Jiwasraya bukan barang bukti. Sehingga, pengembalian ke pihak pemilik harus dilakukan. Barang yang disita saat itu berupa 472.166.000 lembar saham BJBR dari KSEI ke rekening PT Jiwasraya.

Gerakan Aksi juga sudah bersurat ke Presiden, ke KPK dan Kortas Tipikor Polri serta ke Pimpinan Komisi III dan Pimpinan DPR RI untuk audiensi membawa bukti-bukti kuat dugaan pidana penggelapan aset dan korupsi.

Ia juga berpendapat KPK atau Kortas Tipikor Kepolisian Republik Indonesia wajib menindaklanjuti laporan dugaan pidana korupsi ini dengan melakukan penyelidikan atau penyidikan terhadap oknum pimpinan Jaksa yang terlibat. "Dengan terbukanya masalah ini, kita masyarakat akan melihat jelas bagaimana pemberantasan korupsi di negeri ini dicemari dan dikotori oleh perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh para oknum pimpinan Kejaksaan Agung RI," tegas dia. **(Berbagai Sumber-Januar Triwahyudi)**

Penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah. Pelanggaran yang dimaksud terkait pengelolaan barang bukti dalam perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Kena Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak serius mengusut dugaan "SPKR mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menyelidiki peran Febrie Adriansyah selaku eks Direktur Penyidikan Jampidsus, yang saat ini menjabat sebagai Jampidsus dalam penerbitan surat pencabutan blokir saham yang berakibat raibnya aset sitaan senilai sekitar Rp 377,7 miliar," kata koordinator Serikat Pemuda Kerakyatan (SPKR) Amri kepada wartawan, Senin (19/1/2026).

Judul Ciputra Life Ungkap 4 Faktor Asuransi Kesehatan Bisa Moncer pada 2026

Nama Media bisnis.com

Newstrend

Halaman/URL <https://finansial.bisnis.com/read/20260120/215/1945397/ciputra-life-ungkap-4-faktor-asuransi-kesehatan-bisa-moncer-pada-2026>

Tanggal Berita 2026-01-20 08:23

Sentiment Positive



PT Asuransi Ciputra Indonesia (Ciputra Life) membeberkan empat faktor yang membuat pihaknya optimistis produk asuransi kesehatan bisa terus bertumbuh pada 2026.

Direktur Ciputra Life Listianawati Sugiyanto mengatakan optimistis tersebut juga didukung oleh beberapa faktor struktural dan perilaku pasar yang semakin menguat.

Adapun, faktor pertama adalah data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menunjukkan asuransi kesehatan menjadi salah satu kontributor yang cukup besar untuk industri asuransi jiwa, dengan porsi hampir 19% dari total premi industri keseluruhan.

Judul	JMA Syariah Berhasil Penuhi Batas Ekuitas Minimum OJK Lebih Awal
Nama Media	mediaasuransinews.co.id
Newstrend	
Halaman/URL	https://mediaasuransinews.co.id/asuransi/jma-syariah-berhasil-penuhi-batas-ekuitas-minimum-ojk-lebih-awal/
Tanggal Berita	2026-01-20 08:45
Sentiment	Positive



PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk (JMA Syariah) menunjukkan kesiapannya dalam menghadapi ketetapan regulasi mengenai ekuitas minimum. Perseroan mengumumkan telah berhasil memenuhi ketentuan ekuitas minimum sebesar Rp100 miliar.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23 Tahun 2023, seluruh perusahaan asuransi syariah wajib memenuhi batas minimum ekuitas tersebut paling lambat pada 31 Desember 2026.

Laporan posisi keuangan perseroan per 31 Desember 2025 menunjukkan angka ekuitas yang solid di level Rp127,44 miliar. Angka ini mencatatkan kenaikan dari posisi tahun sebelumnya yang berada di angka Rp122,49 miliar.